

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Pemilu, rakyat dapat menentukan masa depan bangsanya.

Pemilu merupakan salah satu bagian dari perwujudan negara demokrasi, dimana rakyat mempunyai hak untuk menentukan pilihannya pada suatu partai yang dianggap mampu mewakili aspirasi politiknya. Dengan demikian Pemilu merupakan sarana yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan kenegaraan, yaitu dengan jalan ikut berpartisipasi dengan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga Legislatif. Pemilu juga bisa dikatakan sarana untuk terbentuknya pemerintahan baru.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. KPU selaku badan penyelenggara Pemilu dalam aktivitasnya juga melakukan sosialisasi tentang Pemilu. Sebagaimana yang disebutkan didalam UU No. 12 tahun 2003, tentang pemilihan umum pasal 26 poin (d) KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat.

Peran KPU Kota Metro sangat penting dalam hal sosialisasi, sebab Pemilu 2009 sangat menyulitkan para narapidana. Selain banyaknya calon legislatif yang justru tidak dikenal,

kesulitan lain adalah dalam hal pemberian tanda pada tata cara pemungutan suara. Para narapidana mengalami kebingungan dengan tata cara yang baru karena yang sebelumnya pemilu menggunakan cara mencoblos salah satu gambar partai sedangkan Pemilu yang sekarang menggunakan cara yang berbeda lagi dengan mencontreng atau menconteng salah satu nama calon legislatif yang ada. Oleh sebab itu sangat penting dilakukan sosialisasi mengenai tata cara mencontreng yang benar, agar tidak terjadi kesalahan pada saat pemungutan suara dalam Pemilu 2009 berlangsung.

Di dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah-wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku politik masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dan diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut dapat mengurangi angka golput yang ada.

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2003 pasal 26, KPU kota Metro memiliki peran dalam mensosialisasikan pemilihan umum kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada para narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Pentingnya KPU mensosialisasikan informasi teknis Pemilu selain karena amanat UU, juga karena teknis pelaksanaan Pemilu 2009 berbeda dengan Pemilu 2004. Bagi sebagian masyarakat yang berada dikota-kota besar mungkin masih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai tata cara dan teknis pelaksanaan Pemilu. Tata cara dan teknis pelaksanaan Pemilu 2009 dapat diakses juga melalui media massa yang menghimbau kepada masyarakat untuk ikut mencontreng dalam Pemilu legislatif 2009.

Dalam kehidupan sosial, selain ada masyarakat yang memiliki kemudahan memperoleh akses informasi mengenai tata cara dan teknis Pemilu, ada pula masyarakat yang sulit memperoleh akses informasi. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang terbatas akses informasinya sangat diperlukan adanya sosialisasi tentang tata cara dan teknis pelaksanaan Pemilu. Diharapkan seluruh masyarakat termasuk para narapidana dapat meningkat pemahaman dan pengetahuannya tentang Pemilu. Dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang Pemilu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi.

Sosialisasi dapat berfungsi sebagai sarana pemberian informasi politik bagi narapidana karena sosialisasi dilakukan bukan hanya dalam hal teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga memberikan pengertian kepada narapidana agar pada saat pemungutan suara tidak ada lagi yang tidak menggunakan hak pilihnya karena adanya kesadaran memberikan suara sesuai hati nurani demi adanya perubahan.

Berdasarkan Polling yang dilakukan atas kerja sama antara Lampung Post dan Laboratorium Politik dan Otonomi Daerah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang dilaksanakan pada 14-15 Maret 2009 pada 200 orang responden (*Harian Lampung Post, Senin 16 Maret 2009*), diperoleh bahwa pengetahuan masyarakat mengenai tata cara mencoblos sebagai berikut. Sebagian dari masyarakat (57%) menyatakan telah mengetahui bahwa untuk menandai pilihan pada surat suara dengan cara mencontreng. Sedangkan sebanyak 43% menjawab tidak mengetahui bahwa pemberian suara dengan cara mencontreng. Responden yang tidak mengetahui cara mencontreng tersebut ternyata memang sengaja tidak mencari tahu karena mereka tidak akan memilih pada pemilu legislatif atau golput. Hal ini berarti membuktikan

bahwa kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu legislatif saat ini masih rendah.

Oleh karena itu, pembelajaran, pengenalan dan informasi mengenai Pemilu pada narapidana adalah hal yang perlu dilakukan. Bagaimana masyarakat akan memilih, jika tidak mengetahui cara memilih yang benar. Pembelajaran, pengenalan ataupun informasi mengenai Pemilu kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan komponen bangsa lainnya. Pembelajaran, pengenalan ataupun informasi tersebut dengan kata lain juga dapat disebut sebagai sosialisasi politik.

Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Metro bersifat internal dan eksternal. Sosialisasi internal adalah sosialisasi yang sifatnya kedalam yaitu sosialisasi yang diberikan kepada panitia-panitia pelaksana Pemilu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sosialisasi yang diberikan menyangkut tentang petunjuk teknis atau permasalahan yang sering terjadi pada saat pemungutan suara, diantaranya menyangkut tatacara pemilihan, tata cara pengisian formulir perhitungan suara, formulir berita acara, teknis perhitungan, pelaporan hasil Pemilu kepada KPU kota Metro dan hal lain yang banyak dikeluhkan penyelenggara Pemilu tingkat bawah. Sosialisasi internal juga mencakup sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada para PPS (Panitia Pemungutan Suara) dimasing-masing desa atau kelurahan. Tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mekanisme teknis Pemilu Legislatif menjadi salah satu indikator atau tolak ukur dari keberhasilan pemilu mendatang yang sudah menjadi kewajiban bagi KPU selaku penyelenggara Pemilu.

Sosialisasi eksternal adalah sosialisasi yang sifatnya keluar yaitu sosialisasi yang diberikan KPU kota Metro kepada masyarakat umum. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan pemasangan spanduk di pinggir-pinggir jalan, penyebaran pamflet. Selain itu KPU Kota Metro juga melakukan sosialisasi secara langsung atau bertatap muka dengan kelompok masyarakat yang diperkirakan pengetahuan tentang Pemilunya masih minim, contohnya dengan memberikan sosialisasi di Lembaga Pemasarakatan (LP), Sosialisasi di LP sangat diperlukan karena para narapidana juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan mengingat para narapidana tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia luar. Sosialisasi di LP penting karena para napi umumnya tidak paham tahapan-tahapan Pemilu termasuk profil para calon legislatif yang ada.

Berdasarkan perolehan suara di TPS 21 Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Metro, tertera data jumlah pemilihan anggota DPR,DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kota Metro sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD-Prov dan DPRD-Kab/Kota Tahun 2009 di LP Kota Metro

No	URAIAN	DPR	DPD	DPRD- PROV	DPRD KAB /KOTA	%
1	Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT	420	420	420	420	100
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih	411	411	411	411	97,8
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih	9	9	9	9	2,1
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	1	1	1	1	0,2
5	Jumlah Surat suara yang dikembalikan karena rusak dan atau keliru dicoblos	-	-	1	4	1,1

Sumber: KPU Kota Metro

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang golput sebesar 2,1% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan jumlah suara yang tidak sah sebesar 6,7% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini menunjukkan bahwa para narapidana penghuni LP Kota Metro memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi, berdasarkan tabel di atas ternyata tingkat partisipasi para narapidana termasuk tinggi padahal akses untuk memperoleh informasi mengenai pemilu sangat terbatas. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang peran KPU kota Metro dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif langsung tahun 2009 di Lembaga Pemasyarakatan. Peneliti ingin mengkaji apakah tingginya tingkat partisipasi di LP merupakan hasil dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Metro. Oleh Michael Rush dan Phillip Althoff, partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik (Rafael Raga Maran, 2001: 147) maka sosialisasi merupakan bagian penting dari proses pelaksanaan Pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut.

Berdasarkan data desk Pilkada Depdagri pada tahun 2005 (dalam Ariska Warganegara dosen Ilmu Pemerintahan Unila) diambil dari 175 wilayah menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi untuk memilih atau golput. Pada Pemilihan legislatif 2004 golput berjumlah 15,93%. Angka partisipasi politik untuk pemilihan legislatif nasional mencapai angka 76,6% pada tahun 2004 dan angka partisipasi politik itu (voter turn out) mengalami penurunan mencapai 0,85% menjadi 75,75% pada tahun 2009. Penurunan angka partisipasi politik pada tahun 2009 masih merupakan angka yang dapat ditoleransi mengingat dalam beberapa kasus di provinsi lain angka partisipasi politik untuk pemilihan legislatif Nasional turun dengan sangat signifikan. (<http://arizka-giddens.blogspot.com/2009/12/refleksi-politik-lampung-tahun-2009.html>)

Menurut Ariska Warganegara bahwa yang menyebabkan tingkat partisipasi menurun jika dibandingkan dengan pemilu 2004, salah satu aspek yang menonjol adalah karena persoalan perubahan tata cara pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mencontreng yang sebelumnya dicoblos, sosialisasi yang belum maksimal yang dilakukan oleh KPU dan KPUD menyebabkan hal itu terjadi. Disamping persoalan sosialisasi yang minim persoalan lainnya adalah kejenuhan masyarakat dengan event-event pemilu.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam perubahan tatanan sosial menuju demokrasi. Rendahnya partisipasi yang tidak diimbangi dengan kekuatan institusi-institusi negara, akan mengakibatkan terjadinya kekacauan sosial. Untuk itu diperlukan pelebagaan partisipasi politik yang terdiri dari dua bentuk, yaitu pelebagaan secara formal dan substansial. Pelebagaan formal mengacu pada prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang. Sedangkan pelebagaan partisipasi substansial lebih berorientasi pada nilai, kesadaran dan sikap individu untuk terlibat dan peduli pada problem sosial dan ketertiban lingkungan.

Oleh sebab itu bertitiktolak dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran KPU Metro Dalam Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu Legislatif 2009.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran KPU dalam sosialisasi peningkatan partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif 2009 khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Metro?
2. Apakah KPU telah menjalankan perannya dalam sosialisasi pemilu legislatif 2009 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Metro?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran KPU dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2009 khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Metro.
2. Mengetahui apakah KPU telah menjalankan perannya dalam sosialisasi pemilu legislatif 2009 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Metro

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, sebagai kontribusi keilmuan untuk memperkaya kajian ilmu politik khususnya yang berkaitan dengan masalah Sosialisasi pemilu, dan kemudian dapat digunakan untuk mengisi khasanah keilmuan politik yang ilmiah



2. Secara praktis, sebagai informasi bagi masyarakat dan khususnya bagi KPU Bandar Lampung, agar dapat menjadi bahan pengembangan kinerja KPU itu sendiri.